

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres yang final pada tanggal 16 Oktober 2023 silam, menghebohkan dunia politik dan hukum Indonesia. Melalui putusan ini, MK memperbolehkan siapa pun yang berusia di bawah 40 tahun (usia minimum pencalonan capres-cawapres) untuk maju dalam kontestasi pilpres dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini berhasil langgengkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali Kota Solo dan masih berusia 36 tahun, untuk mencalonkan diri sebagai cawapres nomor urut dua, berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai usungan Koalisi Indonesia Maju.

Dampak kejadian ini memunculkan berbagai narasi bahwa putusan MK dibuat untuk memenuhi kepentingan dan ambisi dari pihak tertentu. Hal ini diperkuat dengan adanya keinginan Prabowo untuk menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden dari jauh-jauh hari. Prabowo mengaku telah memasukkan nama Gibran sebagai pertimbangan bersama beberapa nama calon bakal lainnya pada bulan Agustus 2023, saat putusan MK terkait batasan usia belum diresmikan (Wahyu NV, 2023). Selain itu, putusan MK secara langsung melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka, sehingga ini memperkuat desas-desus bahwa putusan terkait sengaja dibuat untuk mempermulus jalan Gibran dalam kontestasi pilpres 2024.

Kontradiksi antara pernyataan Jokowi dan anak-anaknya dengan kenyataan yang terjadi di dunia politik juga turut menjadi sorotan. Beberapa tahun silam, Jokowi menyebut anak-anaknya tidak berminat di dunia politik, demikian pula yang disebut oleh kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Namun pada akhirnya, keduanya terjun ke dunia politik dan mampu meraih posisi strategis dalam waktu yang singkat. Dimulai dari Gibran yang menjadi Wali Kota Solo, Kaesang yang baru memasuki dunia politik langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ditambah menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan. Lalu babak baru dimulai ketika putusan MK berhasil langgengkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Selain keterlibatan anggota keluarga Jokowi, fakta bahwa putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dikeluarkan ketika dinamika pilpres 2024 sedang naik-naiknya, memperkuat narasi bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Berbagai pakar seperti Yoes C Kenawas, Ray Rangkuti, hingga Bavitri Susanti mengkritisi Presiden Jokowi dan Mahkamah Konstitusi mengenai keputusan yang diambil. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari dalam CNN Indonesia (2023) pun menyebut MK sebagai 'Mahkamah Keluarga' karena keterlibatannya dalam membantu pencalonan putra sulung Jokowi. Kehadiran Gibran dalam kontestasi pilpres 2024 dianggap sebagai salah satu usaha Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya di akhir masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Oleh karena itu, wacana publik tentang dinasti politik dalam kontestasi pilpres 2024 pun erat kaitannya dengan sosok Jokowi keluarganya, terutama Gibran Rakabuming Raka.

Narasi Jokowi sedang membangun dinasti politik pada kenyataannya tidak banyak yang sadar bahkan mengetahuinya. Lembaga survei Saiful Mujani *Research and Consulting* pada November 2023 menyatakan, hanya 37 persen dari total 2.400 responden yang mengetahui atau pernah mendengar isu tersebut. Dari 37 persen itu, hanya 68 persen yang percaya kalau Jokowi sedang membangun dinasti politik, 27 persen mengaku tidak percaya, dan 5 persen tidak menjawab. Kecilnya persentase kesadaran masyarakat akan usaha dinasti politik Jokowi membuat adanya tarik menarik pemahaman dinasti politik Jokowi melalui putusan MK yang muluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden. Di sisi lain dari banyaknya wacana dinasti politik yang mengarah kepada Jokowi, masih ada beberapa pihak yang menganggap hadirnya putusan MK tentang batasan usia capres cawapres ini merupakan salah satu bentuk perwujudan praktik demokrasi.

Isu dinasti politik sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Dilansir dari Infografik Kompas (2023), beberapa nama politikus bahkan presiden terdahulu pernah melibatkan anggota keluarga di dunia politik ketika yang bersangkutan masih menjabat. Namun, politikus yang melibatkan anggota keluarga pada umumnya sebatas pada tataran legislatif atau yudikatif. Seperti kala Gus Dur menjabat sebagai presiden, adik dan keponakannya, Salahuddin Wahid dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menduduki kursi MPR dan DPR. Di era Megawati Soekarnoputri, suami dan iparnya, Taufiq Kiemas dan Nazarudin Kiemas, keduanya menjabat sebagai anggota DPR. Kemudian di era SBY beberapa anggota keluarganya menduduki kursi di DPR dan DPRD, sedangkan besannya, Muhammad Hatta Rajasa tiga kali menjabat sebagai menteri selama dua periode SBY.

Baru di masa kepresidenan Jokowi-lah, anggota keluarga dilibatkan di posisi strategis pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan adik iparnya, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka sukses maju sebagai calon wakil presiden. Selain kontradiksi pernyataan Jokowi mengenai nasib politik anak-anaknya yang berbeda dengan kenyataan, salah satu alasan mengapa dinasti politik Jokowi ramai dibicarakan adalah ketika Gibran bisa memasuki ranah eksekutif secara ‘paksa’ di saat sang ayah masih aktif menjabat sebagai presiden.

Sebagai negara dengan bentuk pemerintahan republik, isu dinasti politik yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran dalam kontestasi pilpres 2024 merupakan topik yang saat ini dibicarakan dengan serius. Dinasti politik dalam praktik demokrasi dinilai dapat menciderai esensi demokrasi karena merusak berbagai kegiatan dalam demokrasi, seperti sistem *check and balance*, korupsi, penimbunan kekayaan bagi sekelompok kecil orang, dan pergiliran jabatan dalam lingkungan keluarga. Dinasti politik juga berpotensi meningkatkan perilaku oligarki yang hanya memenuhi hasrat sekelompok orang tertentu. Kehadiran fenomena dinasti politik di negara demokrasi dapat dianggap sebagai manifestasi hilangnya etika dalam pentas politik (Riyanda, 2020).

Oleh karena itu, isu dinasti politik menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan di tahun politik 2024. Berbagai media nasional bahkan dunia, membahas dan mengkritisi permasalahan ini melalui produk jurnalistik yang dimiliki. Menyampaikan kritik yang berkaitan dengan isu sosial seperti ekonomi, budaya, dan politik merupakan salah satu cara media massa untuk memenuhi fungsi pers sebagai

alat kontrol dan katarsis sosial (Akbar, 2016). Kritik sosial biasa dilakukan ketika ada sesuatu yang salah dalam sistem sosial masyarakat sehingga muncul penyuaran ketidaksetujuan secara simbolis. Louw (2010) menyebut media memiliki peran untuk selalu mengkritik pemerintah dan mendukung hak warga untuk melawan penyelewengan kekuasaan. Oleh karena itu, penyampaian kritik sosial disebutkan oleh Akbar (2016), menyebabkan media massa sering kali berhadapan dengan aspek power dari kekuasaan pemerintah yang dideskripsikan sebagai pihak yang distorsif, ekksesif, koruptif, dan lain sebagainya.

Dalam laga pemilihan pemimpin seperti pemilu dan pilkada, media massa merupakan sarana penting bagi publik untuk mengetahui berbagai informasi seputar pemilihan, seperti proses politik yang terjadi, kandidat, dan isu apa yang sedang hangat dibicarakan. Bagi pihak dari dunia politik seperti politikus atau tim kandidat, media dapat menjadi acuan atau referensi bagi mereka untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan (Louw, 2010). Mereka juga memonitori media untuk mengetahui bagaimana media melakukan pemberitaan mengenai diri mereka sendiri atau pihak lain. Keberadaan media massa bagaikan senjata bermata dua karena dapat menguntungkan atau merugikan politikus dan pemerintah tergantung dari bagaimana media melakukan penyajian informasi. Merujuk pada sebuah istilah lama yang populer, *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita yang baik), membuat media tak ragu memberitakan atau membahas skandal politik yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah. Hal ini dibuktikan dari isu dinasti politik dalam kontestasi pilpres 2024 yang membawa nama Jokowi, banyak dibahas bahkan dikritik oleh media massa.

Kritik sosial yang dilakukan media massa umumnya dilakukan melalui tulisan editorial yang biasa dikenal sebagai tajuk rencana atau opini. Selain tulisan, ada satu wadah lainnya yang juga dimanfaatkan media untuk menyampaikan kritik secara sederhana dan menghibur, yaitu kartun editorial. Menurut Salam (2017), kartun editorial adalah gambar yang dibuat dan digunakan untuk menyampaikan opini. Gambar ini lazim ditampilkan pers melalui media massa seperti koran dan majalah untuk mewakili pandangan redaksi terhadap suatu isu. Keberadaan kartun editorial digunakan untuk menyindir dan memperingatkan (Sobur, 2017). Oleh karena itu, dalam praktik jurnalistik, kartun editorial berperan sebagai sarana penyampaian opini, aspirasi, dan berita secara visual selain menggunakan tulisan (Ahdiyati, 2021).

Beberapa media di Indonesia aktif menggunakan kartun editorial sebagai bentuk kritik terhadap isu sosial yang sedang berkembang. Tempo merupakan media yang sering menampilkan kartun editorialnya di majalah minggunya, yaitu sebagai pendamping tajuk rencana pada rubrik opini dan tampil mandiri sebagai sampul depannya. Majalah Tempo biasa dikenal karena tulisannya yang mengkritik secara tajam melalui gaya penulisan jurnalisme modern (sastrawi). Akan tetapi, Majalah Tempo juga dikenal memiliki sampul depan yang khas, yaitu menggunakan kartun editorial yang mengandung kritikan terhadap isu tertentu. Oleh karena itu, kartun editorial pada sampul depan Majalah Tempo sering menimbulkan kontroversi dan amarah dari pihak tertentu. Seperti edisi 16-22 September 2019 bertajuk “Janji Tinggal Janji” yang menyajikan gambar Jokowi bersama Pinokio (yang diketahui sebagai tokoh kartun yang suka berbohong). Ada juga sampul depan yang pernah dilaporkan oleh staf

kepresidenan, Moeldoko, yaitu Majalah Tempo edisi 25-31 Desember 2023 yang bertajuk “Beking Mobil Listrik Wuling.”

Berkaitan dengan isu dinasti politik selama kontestasi pilpres 2024, Tempo juga mengkritisi isu tersebut melalui kartun editorialnya. Dimulai pada edisi 16-22 Oktober 2023, Tempo menerbitkan majalahnya bersama sampul depan berjudul “Gerilya Untuk Putra Mahkota” yang memuat ilustrasi Gibran Rakabuming Raka bersiluet Jokowi. Di edisi tersebut, Tempo memprediksi adanya usaha Jokowi mendukung putra sulungnya bersama Prabowo melalui bantuan Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya MK merilis putusan yang terkait pada tanggal 16 Oktober 2023. Edisi selanjutnya, 23-39 Oktober 2023, sampul depan Majalah Tempo menggambarkan Anwar Usman sedang mengetuk meja menggunakan palu dan ketukan tersebut membentuk retakan yang menyerupai wajah Gibran. Tempo menilai putusan terbaru MK kala itu sarat akan kepentingan tertentu dengan skenario ganjil selama proses pembuatan putusan, sehingga perlu ditinjau kembali mengenai kode etik seorang hakim Mahkamah Konstitusi.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan, dari bulan Oktober, sejak putusan MK mengenai batasan usai capres-cawapres dikeluarkan, hingga akhir bulan Januari, sebelum pemilu tanggal 14 Februari 2024, Tempo beberapa kali menyajikan majalahnya dengan sampul depan berupa kartun editorial yang mengandung kritikan terhadap isu dinasti politik selama kontestasi pilpres 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari sampul depan Majalah Tempo yang menggambarkan Gibran bersama anggota keluarganya seperti Jokowi, Anwar Usman, dan sang ibu, Iriana Jokowi. Selain itu, kartun editorial yang dimaksud secara bersamaan digunakan juga sebagai pendamping

rubrik opini yang memuat tulisan tajuk rencana Tempo mengenai isu dinasti politik dalam pilpres 2024.

Ketika menyajikan informasi dan menyampaikan pendapat atau kritik, media dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti individu, lingkungan kerja media, efek luar media, hingga ideologi atau keyakinan yang dimiliki media (Shoemaker & Reese, 2014). Oleh karena itu, produk keluaran media seperti pemberitaan, opini, siniar, atau kartun editorial yang mengandung kritik sosial, diyakini oleh Shoemaker dan Reese, bahwa media tidak netral dalam melakukan penyajian informasi, melainkan terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya termasuk ideologi. Hal ini dapat menjawab pertanyaan mengapa media melakukan penyajian informasi yang lebih tajam atau lebih tumpul dibandingkan media lain, atau mengapa antara media satu dengan media lainnya masih memiliki perbedaan dalam menyajikan satu isu yang sama.

Dalam konteks isu dinasti politik pada pilpres 2024, Tempo terlihat lebih tajam dalam mengkritisi atau menyuarakan betapa pentingnya isu ini untuk dibahas. Tempo melakukannya tidak hanya melalui tulisan seperti pemberitaan dan tajuk rencana, atau melalui siniar resminya berupa “Bocor Alus Politik” saja, tetapi juga melalui kartun editorial yang tertera sebagai sampul depan majalahnya. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan tanda-tanda visual yang digunakan lalu dikombinasi oleh Tempo sehingga membentuk suatu gambar utuh yang mengandung pesan berupa satir atau kritik terhadap isu tertentu. Pembentukan visual editorial sebagai bentuk kritik sosial, berkorelasi dengan pernyataan Gondwe dan Walcott (2024) yang menyebut bahwa kartun editorial dapat mencerminkan bagaimana posisi pembuat gambar atau instansi media dalam menghadapi isu sosial, politik, atau budaya, entah itu setuju atau

menentang. Dari sini dapat dilihat, bahwa kritik sosial yang disampaikan Tempo melalui kartun editorialnya mengenai isu dinasti politik juga bisa memperlihatkan bagaimana posisi Tempo dalam menghadapi salah satu isu di tahun demokrasi 2024 ini.

Selain konteks kritik sosial, ideologi atau posisi media dapat mempengaruhi bagaimana suatu isu dihadirkan kembali (direpresentasikan) oleh media. Representasi adalah keterwakilan suatu isu atau fenomena melalui penggunaan tanda seperti bahasa dan tanda visual. Danesi (2004) menyebut adanya representasi dalam kumpulan tanda memungkinkan manusia untuk memahami berbagai hal seperti fenomena, ide, atau budaya. Namun, representasi atau pesan yang dikemas media tidak akan terlepas dari posisi dan ideologi media, disebutkan oleh Kartikasari dan kawan-kawan (2014) bahwa representasi bisa digunakan sebagai bentuk siratan makna dan ideologi tertentu. Sebagai akomodasi informasi dalam berbagai wujud, media membentuk dan menyebarkan informasi berupa pesan yang mencerminkan budaya dalam masyarakat kepada publik untuk dikonsumsi secara luas (Muzakkir, 2020). Hal ini berkorelasi dengan media yang membentuk representasi atas isu tertentu dan disebarkan kepada khalayak. Roikan (2020) menyebut keberadaan kartun editorial dapat menjadi sarana dalam menghadirkan kembali (representasi) fenomena. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa melalui kartun editorialnya, Tempo tidak hanya menyampaikan kritik sosial, tetapi apabila beberapa kartun editorial mengenai isu dinasti politik dari Tempo dikumpulkan dan dianalisis bersama, maka akan diketahui juga bagaimana Tempo memandang kemudian merepresentasikan dinasti politik.

Untuk menjawab bagaimana kritik sosial dan representasi tentang dinasti politik yang dilakukan Tempo melalui kartun editorialnya, dapat terjawab melalui pembedahan visual menggunakan semiotika sebagai pisau bedah penelitian. Menurut John Fiske (dalam Vera, 2014), semiotika adalah ilmu tentang tanda dan makna, bahwa media membangun dan mengkomunikasikan makna kepada khalayak melalui tanda-tanda yang ada dalam produknya (seperti tulisan, film, atau visual). Tanda-tanda yang hadir dapat diidentifikasi maknanya dengan berbagai cara, salah satunya melalui kesamaan bentuk, adanya sebab akibat, dan tanda yang diyakini secara bersama oleh sosial. Melalui identifikasi tanda yang dilakukan, akan menghasilkan interpretasi atau pemaknaan yang nantinya akan membawa kepada jawaban bagaimana suatu media memandang suatu isu atau bagaimana media membawakan isu tersebut kepada publik. Oleh karena itu, melalui analisis semiotika dapat terjawab pertanyaan bagaimana Tempo melakukan representasikan dan mengkritik isu dinasti politik melalui pemanfaatan visual berupa kartun editorial.

Melalui penjabaran di atas, semiotika gagasan Charles Sanders Peirce dapat digunakan untuk menganalisis kartun editorial pada sampul depan Majalah Tempo. Semiotika gagasan Peirce membahas bagaimana tanda diwakili atas sesuatu (representamen), bagaimana pengidentifikasian tandanya sebagai objek (ikon, indeks, dan simbol), dan makna apa yang dihasilkan (interpretasi), semua itu melalui proses triadik yang disebut semiosis. Ini sesuai dengan kartun editorial Tempo yang memiliki keberagaman tanda yang hadir dalam visual terkait mengenai isu dinasti politik, sehingga dapat diidentifikasi dengan semiotika Peirce.

Berkaitan dengan Majalah Tempo sebagai bagian dari penelitian semiotika, berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya untuk memaknai kartun editorial yang ada pada sampul depan Majalah Tempo. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rosiani, Indrawati, dan Jufrizal (2024) dengan judul “Makna Cover Majalah Tempo ‘Siasat Pinokio Senayan’ Edisi 19-20 Oktober 2020.” Penelitian ini membahas sampul depan Majalah Tempo yang menyorot isu pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 silam. Lalu penelitian oleh Sadono dan Amina (2023) yang berjudul “*The Fight for The 2024 Presidential Election within The PDIP within The Framework of Tempo*” membahas sampul depan Majalah Tempo edisi Mei 2021 yang menyorot konflik internal PDIP dalam memilih kandidat calon presiden 2024. Meskipun membahas isu yang berbeda, tetapi pembahasan dari dua penelitian ini hanya sebatas pada pemaknaan tanda berdasarkan analisis semiotika yang digunakan tanpa adanya elaborasi lebih lanjut dengan konsep lain yang mungkin berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, melalui tulisan ini, peneliti tertarik untuk meneliti kartun editorial yang ada pada sampul depan Majalah Tempo menggunakan analisis semiotika. Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini akan fokus membahas bagaimana Tempo merepresentasikan isu dinasti politik yang ramai dibicarakan selama kontestasi pilpres 2024 dan kritik sosial apa yang disampaikan melalui kartun editorialnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menyadari peran kartun editorial yang tidak hanya hadir sebagai hiasan, pendamping artikel, atau dinikmati secara visual saja, tetapi kartun editorial pun juga bisa digunakan media massa sebagai penunjukkan posisi atas suatu isu melalui penggambaran representasi dan penyampaian kritik sosial.

Peneliti memandang kartun editorial pada sampul depan Majalah Tempo sebagai salah satu bentuk kritik sosial sekaligus representasi suatu isu melalui tanda-tanda yang hadir pada wadah terkait dan menganalisis dua hal ini dapat menunjukkan bagaimana sikap Tempo sebagai media massa dalam memandang masalah ini. Dengan semiotika Charles Sanders Peirce dan menggunakan paradigma kritis, peneliti hendak melakukan penelitian melalui judul **Representasi Isu Dinasti Politik dalam Kontestasi Pilpres 2024 Melalui Kartun Editorial Sebagai Bentuk Kritik Sosial (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Sampul Depan Majalah Tempo Edisi Oktober 2023 – Januari 2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun berdasarkan uraian sebelumnya adalah bagaimana representasi isu dinasti politik dalam kontestasi pilpres 2024 melalui kartun editorial Majalah Tempo sebagai bentuk kritik sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis representasi isu dinasti politik dalam kontestasi pilpres 2024 yang dilakukan Majalah Tempo pada kartun editorialnya.
2. Untuk menganalisis kritik sosial yang disampaikan Tempo terkait isu dinasti politik melalui kartun editorial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberi wawasan di bidang ilmu komunikasi mengenai pembahasan semiotika dan memperkaya penelitian keberagaman penelitian, serta bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang tertarik meneliti semiotika terutama pada kartun editorial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan menjadi bahan diskusi bagi khalayak umum mengenai isu dinasti politik sehingga peka terhadap fenomena dinasti politik dalam arus politik masa kini. Untuk media pers Indonesia, penelitian ini bisa menjadi motivasi untuk memanfaatkan kartun editorial sebagai kritik sosial lebih masif lagi.

